

BAB I

PENDAHULUAN

Dasar Pemikiran

Sebagai ibukota, Jakarta lantas tidak terlepas dari berbagai masalah yang ada. Terkenalnya Jakarta sebagai ibukota, tentunya banyak masyarakat yang memiliki stigma bahwa “semua ada di Jakarta”. Akhirnya, banyak masyarakat dari seluruh Indonesia datang ke Jakarta dengan berbagai tujuan yang menyebabkan masalah kepadatan penduduk. Masalah ini terus melebar menjadi masalah lain seperti masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah kebersihan, dan banyak masalah lainnya. Masalah kependudukan sangat berpengaruh terhadap masalah ekonomi. Jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Begitupun sebaliknya, jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan tingkat kualitas yang rendah, menjadikan penduduk tersebut sebagai beban bagi pembangunan. Masalah inilah yang menyebabkan tidak semua penduduk di ibukota memiliki pekerjaan yang layak. Karena tidak semua dari mereka memiliki kualitas yang mumpuni untuk bekerja. Pekerjaan yang dijalani pun berbagai macam, demi bertahan hidup di ibukota.

Dari berbagai pekerjaan yang dijalani, salah satunya adalah PSK. PSK merupakan singkatan dari pekerja seks komersial. PSK merupakan pekerjaan yang tergabung dalam bisnis prostitusi. Prostitusi adalah suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya. Pada umumnya, bisnis seks di kota-kota besar ini memiliki tempat khusus yang disebut dengan lokalisasi. Para pelacur bekerja secara terorganisir dan diawasi oleh seorang yang disebut dengan germo. Akan tetapi tidak sedikit juga para pelacur yang tidak tergabung dalam lokalisasi atau lebih memilih untuk bertebaran di berbagai tempat secara terselubung dalam melakukan praktiknya, seperti di hotel, wisma, musik room, taksi, tempat kost, panti pijat atau tempat lainnya (Ikhwan dan Erianjoni 2020). Wanita-wanita yang menjadi (PSK) mendapat julukan sebagai '*public women (publieke vrouwen/wanita publik)*'.

Pada tahun 1950 lokasi praktek prostitusi masih bercampur dengan rumah-rumah penduduk. Wanita-wanita PSK berkeliaran di sepanjang jalan Kramat Jaya dan Senen. Diantara wanita-wanita itu ada anak-anak yang masih usia belasan. Ada pula yang disebut 'becak komplit' karena kendaraan tersebut membawa keliling wanita-wanita PSK. Masyarakat lingkungan sekitar memberi pendapat agar wanita-wanita PSK ditampung dan disalurkan ke berbagai proyek setelah diindoktrinasi. Namun, Ali sadikin tidak menyetujuinya. Tahun 1970-an, Mantan Gubernur Jakarta Ali

Sadikin menangkap bahwa jumlah PSK sudah mencapai ribuan. Ali Sadikin berusaha bagaimana cara mengendalikan pekerja seks, karena pekerjaan tersebut sudah menjadi mata pencaharian bagi sebagian orang. Agar pelacuran tersebut tidak berkeliaran di sembarang tempat, mencegah berbagai penyakit khususnya yang disebabkan oleh seks bebas, dan tentunya menjadikan ibukota lebih tertib. Maka ia memutuskan untuk melokalisasi pekerja seks. Industri seks pun dipusatkan di Kawasan Kramat Tunggak, Jakarta Utara.

Ali Sadikin terinspirasi oleh tempat pelacuran yang ada di Bangkok, Thailand. Disana Ali Sadikin bertanya kepada kedutaan Indonesia yang ada di Thailand. Ternyata, pelacuran di Thailand sudah dilokalisasi. Kramat Tunggak kemudian ditetapkan sebagai lokalisasi melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta No. Ca.7/I/13/1970 per tanggal 27 April 1970 tentang Pelaksanaan Usaha Lokalisasi/Relokasi Wanita Tuna Susila. Kebijakan yang dilakukan Ali Sadikin tentunya banyak mengundang perhatian masyarakat. Khususnya KAWI (lembaga masyarakat yang dikhususkan untuk Kajian Wanita). Presidium KAWI Pusat yang dipimpin oleh Ny. Sjamsinoer Adnoes menentang adanya pendirian lokalisasi, ia berpikir bahwasanya hal tersebut merupakan eksploitasi manusia atas manusia, merendahkan derajat wanita, dan menurunkannya kemungkinan rehabilitasi bagi wanita yang sadar. Tuntutan mereka adalah meningkatkan

sanksi hukuman serta menindak tegas germo-germo yang merupakan bidang meluasnya pelacuran. (Widyaningrum 2013)

Alat-alat negara yang ditugaskan untuk mengawasi tuna susila tersebut harus selalu didampingi polisi-polisi wanita, melarang penjualan obat-obat perangsang, dan memberikan sanksi yang berat terhadap pendistribusian obat-obat perangsang. Lalu Ali Sadikin membentuk panitia kecil untuk mengatasi wanita-wanita PSK, dan dimasukkannya beberapa anggota KAWI ke dalam panitia kecil tersebut. Pelaksanaan daripada lokalisasi ini diatur oleh Surat Keputusan Walikota Jakarta Utara Nomor /SKPTS/JU/74 tertanggal 20 Maret 1974. Dalam pelaksanaannya, walikota dibantu Dinas Sosial Jakarta Utara. Dalam pelaksanaan sehari-hari diwakili oleh koordinator harian kompleks sekaligus bertindak sebagai Pimpinan Panti Pendidikan. Tujuan dibentuknya lokalisasi adalah untuk resosialisasi/rehabilitasi. Usaha yang dilakukan dalam masa resosialisasi adalah memberi keterampilan-keterampilan (memasak, menjahit, menyulam, dan merawat muka), memberi bimbingan dan nasehat (Pendidikan mental rohani berupa Pendidikan agama), mengikutsertakan wanita tuna susila bila ada acara-acara nasional.

Dalam penanganan Kramat Tunggak, tidak terlepas dari peran organisasi sosial. Istilah lain dari organisasi sosial yang dikelola secara modern adalah Lembaga Swadaya Masyarakat. Perannya mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan pendidikan yang lebih ditekankan

kepada latihan-latihan keterampilan. Staf organisasi sosial sering didatangi wanita tuna Susila dengan maksud menceritakan kesulitan-kesulitannya, berarti sudah adanya tingkat kepercayaan yang tinggi pada organisasi sosial. Salah satu LSM yang berperan yaitu Yayasan Kusuma Buana (YKB), adalah sebuah organisasi non-profit, non-pemerintah, didirikan pada tanggal 8 Februari 1980 dokter Firman Lubis. Beliau adalah dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia bagian Ilmu Kedokteran Komunitas, beliau juga seorang aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat. Tujuan beliau mendirikan LSM ini untuk memperkuat peran sektor swasta dalam keluarga berencana, perawatan kesehatan reproduksi dan pengembangan masyarakat melalui pengabdian masyarakat, penelitian dan pendidikan Kesehatan

YKB pusat berada di Jl. Asem Baris Raya A/3, Gedung Peluru, Tebet, Jakarta Selatan. Yayasan Kusuma Buana memiliki visi yaitu mewujudkan masyarakat madani yang sehat, sejahtera, dan mandiri serta misi Yayasan Kusuma Buana adalah 1) memberdayakan masyarakat melalui pelayanan kesehatan dasar, kesehatan reproduksi komprehensif, advokasi, dan pengembangan masyarakat bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, 2) menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat melalui penelitian, pelatihan komunikasi- informasi- edukasi dan konsultasi, 3) memperluas jejaring Nasional dan Internasional untuk kemandirian dan keberlanjutan organisasi, dan 4) meningkatkan kapasitas

YKB untuk menjadi centre of excellence melalui pelayanan dan program kesehatan yang berkualitas dan berkelanjutan. (Impact Plus 2022)

Program KB sangat berjaya saat masa kepemimpinan Presiden Soeharto. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang dibentuk pada masa kepemimpinan beliau adalah sebagai Lembaga Pemerintah Non-kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Kesehatan. BKKBN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Menurut Mardiya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulonprogo, 2003 menyatakan “Saat KB masih menjadi program rintisan pemerintah tahun 1970 an dan era perluasan jangkauan tahun 1980 an, banyak berita yang bernada negatif tentang KB dan alat kontrasepsi. Berita dari mulut ke mulut yang menyatakan bahwa pemakaian alat kontrasepsi itu berbahaya seperti IUD yang dipasang dalam rahim ibu dapat “berjalan-jalan” sampai ke jantung atau paru-paru dan menembusnya sehingga dapat menimbulkan kematian. Di samping itu, IUD juga dapat menyebabkan kecacatan bayi jika si pemakai IUD mengalami kehamilan, karena IUD dapat masuk ke kepala bayi. Suntikan dan Pil KB juga pernah diberitakan dapat menyebabkan kemandulan. Tidak terkecuali juga, alat kontrasepsi *Implant* (Susuk KB) yang dipasang di lengan kiri seorang ibu dapat berjalan-jalan sampai ke pergelangan tangan, dada, bahkan sampai ke kepala.” (Mardiya 2003)

Rumor KB yang terus beredar tentunya menghambat kemajuan pemasyarakatan KB di Indonesia. Pada tahun 1970-1980, memang masa-masa rawan dan penuh tantangan dalam menerapkan pembudayaan Norma Keluarga Kecil sebagai salah satu tujuan dari program KB. Orang masih sangat mudah menerima desas-desus, sebab informasi dan edukasi tentang KB masih sangat kurang serta tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat yang terbilang masih rendah menyebabkan mereka mudah percaya tentang rumor. Dalam menangani rumors kb dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak. Presiden Soeharto kala itu melakukan kerjasama dengan banyak pihak seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi wanita seperti Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan melalui media massa.(Putri, Hubeis, and Sarwoprasodjo 2019). Kekhawatiran Firman Lubis terhadap permasalahan Keluarga Berencana dan Kesehatan masyarakat menjadi sebuah alasan mengapa ia mendirikan LSM. Hal ini ditunjukkan tahun 1981, Yayasan Kusuma Buana berhasil merintis pelayanan KB yang ditunjukkan untuk kelompok sosial ekonomi ke bawah dengan konsep *low cost but good quality service* secara mandiri.

Kasus HIV-AIDS pertama kali ditemukan di Bali pada tahun 1987, jumlah kasusnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Kasus HIV-AIDS pada mulanya ditemukan pada kelompok homoseksual. Resiko penularan sudah terjadi tidak hanya satu populasi yang memiliki resiko tinggi. HIV-AIDS juga telah menginfeksi ibu rumah tangga, bahkan pada anak-anak atau bayi yang dikandung atau tertular dari ibu pengidap HIV-

AIDS. Namun demikian, kecenderungan memperlihatkan bahwa kasus HIV-AIDS tertinggi ditemukan dari hubungan seksual, yang ditularkan dari dan menularkan pada pekerja seks. Gelombang Pertama epidemi HIV-AIDS terjadi pada 1987 sampai 1997. (Purwaningsih and Widayatun 2008)

Menurut Inang Winarso selaku pimpinan Yayasan Kemitraan Indonesia Sehat dalam opini yang ia tulis di artikel Pikiran Rakyat yaitu “Pada gelombang pertama, terjadi peristiwa menghebohkan ketika ada pasien HIV ditolak rumah sakit di Jakarta. Merespon kejadian tersebut, beberapa tokoh berkumpul di Yayasan Kusuma Buana Jakarta. Diantaranya Nafsiah Mboi (mantan Menteri Kesehatan RI), Zubairi Djoerban, Samsuridjal Djauzi, Firman Lubis, Adi Sasongko dan Marsilam Simanjutak (mantan Menseskab periode Gus Dur) serta beberapa aktivis LSM lainnya. Akhirnya bisa diatasi ketika pasien tersebut dirujuk ke salah satu rumah sakit di Jakarta Barat.” Di periode ini pula terbit Keputusan Presiden nomor 36 tahun 1994 tentang Komisi Penanggulangan AIDS.

Keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam penanggulangan HIV dan AIDS tampak pada perannya dalam penyediaan layanan, advokasi, serta pendidikan dalam komunitas di Indonesia termasuk Provinsi DKI Jakarta. Peran LSM diwujudkan lebih dominan kepada kegiatan promosi dan pencegahan pada populasi kunci. Kelompok populasi kunci terdiri atas Wanita Pekerja Seks (WPS), ibu rumah tangga, homoseksual, pengguna narkoba suntik, dan Pasien TBC. Upaya penanggulangan HIV dan AIDS perlu menyentuh faktor sosial kemasyarakatan sehingga diharapkan dapat

melibatkan masyarakat sebagai bagian pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS. LSM juga berperan penting dalam memberikan dukungan sosial kepada kelompok dampingan. kerjasama dalam pencegahan HIV AIDS dapat dilihat bahwa LSM beberapa kali terlibat bekerja sama dengan instansi pemerintah, antara lain Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial. Pencegahan HIV AIDS membutuhkan peran antar stakeholder, sehingga sangat penting adanya kolaborasi baik antara pemerintah, LSM, dan Masyarakat. (Nurdiansyah 2012) Adanya program dari pemerintah seperti pemetaan populasi kunci, maka tugas LSM yang diharuskan dekat dengan masyarakat untuk menganalisis wilayah yang terdapat populasi kunci.

Yayasan Kusuma Buana adalah LSM yang telah berhasil berkembang sejak tahun 1980 hingga tahun 2024. YKB merupakan lembaga yang ikut serta dalam merintis upaya pemberantasan cacangan dan anemia berbasis sekolah dasar, serta penanggulangan TB dan AIDS berbasis tempat kerja. YKB bekerja sama dengan organisasi pemerintah maupun swasta, dalam dan luar negeri yang bergerak dalam bidang dan tujuan yang sama. Melaksanakan kegiatan Keluarga Berencana dalam pemukiman padat perkotaan yang memiliki kesulitan dan permasalahan tersendiri, terutama praktek KB yang rendah pada akhir 1980-an. Dalam kelompok masyarakat kelas menengah kebawah, rata-rata kaum ibu-ibu juga bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Bila waktu siang hari hingga sore hari dihabiskan untuk bekerja, maka tidak ada waktu untuk melakukan program KB. Sedangkan masyarakat dengan strata tersebut, tempat untuk

melaksanakan program KB yang dapat dijangkau adalah puskesmas. Sehingga, bila mereka datang pagi-pagi sekali puskesmas belum buka, sedangkan kalau sore hari puskesmas sudah tutup. Maka mereka tidak sempat untuk melaksanakan program KB. YKB dalam hal ini melaksanakan praktek KB untuk masyarakat kelas menengah kebawah dengan tidak terikat oleh waktu.

YKB juga mendorong kemandirian masyarakat dalam meningkatkan derajat Kesehatan dan memasyarakatkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Sejak 1991, YKB telah menggunakan sebuah unit x-ray pemberian dari Asosiasi Layanan Kesehatan Chiba Jepang untuk melakukan program pemeriksaan kesehatan tahunan di pabrik-pabrik, terutama di Jakarta dan wilayah sekitarnya. Tahun 1991, YKB menjadi LSM pionir pertama di negeri ini yang menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan mengenai pencegahan AIDS, memadukan kedua kegiatan tersebut ke dalam program pemeriksaan tahunan (kesehatan pekerja) pabrik. Sejak saat itu YKB telah memperluas upayanya di tempat bekerja, sebab 92 persen dari mereka yang terinfeksi berada dalam usia kerja utama, yaitu antara usia 21 hingga 49 tahun.

YKB menggunakan pendekatan “permintaan dan penawaran” dalam upaya pencegahan HIV/AIDS, YKB melengkapi pekerjaannya dari segi “permintaan” yaitu dengan para pekerja, dan dari segi “penawaran” menjangkau kegiatan ke tempat-tempat hiburan, termasuk panti pijat, klub

malam dan bar karaoke di pusat-pusat hiburan besar di ibukota. YKB terlibat aktif dalam permasalahan reproduksi dan pencegahan HIV/AIDS. YKB telah aktif terlibat dalam program pencegahan HIV/AIDS melalui salah satunya memandirikan pekerja seks. Pekerja seks yang berhasil dibina oleh YKB yaitu yang bertempat di Kramat Tunggak.(Pt et al. 2008) YKB melakukan pendampingan PSK di Kramat Tunggak dari tahun 1991-1999.

“Pendampingan menurut Direktorat Bantuan Sosial adalah suatu proses pemberian kemudahan yang diberikan pendamping kepada klien dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian dapat diwujudkan.” Pendampingan merupakan strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat, sesuai dengan prinsip yakni membantu orang. Dalam suatu kelompok seperti halnya PSK, mereka perlu didampingi dalam mengatasi permasalahan. Dalam upaya pemecahan masalah, peran pendampingan hanya sebatas pada memberikan alternatif-alternatif yang dapat diimplementasikan. Dan kelompok pendamping dapat memilih alternatif mana yang sesuai untuk diambil. Peran pendamping yaitu sebagai fasilitator dan pendidik. Fasilitator merupakan peran yang berkaitan dengan pemberian motivasi, kesempatan, dan dukungan bagi kelompok. Pendidikan yang diberikan lebih ditekankan kepada latihan-latihan keterampilan yang dapat berguna sebagai bekal praktis, pendidikan agama dan budi pekerti.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik meneliti mengenai “Peran Yayasan Kusuma Buana dalam Pendampingan PSK di Lokalisasi Kramat Tunggak tahun 1991-1999. Alasan pertama dari peneliti, dimana Kramat Tunggak merupakan sejarah berdirinya Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta yaitu *Jakarta Islamic Centre*. Pada tahun 1998 dikeluarkan SK Gubernur DKI Jakarta No. 495/1998 tentang penutupan panti sosial tersebut selambat-lambatnya akhir Desember 1999. Pada 31 Desember 1999, Lokalisasi Kramat Tunggak secara resmi ditutup melalui SK Gubernur DKI Jakarta No. 6485/1998. Selanjutnya Pemda Provinsi DKI Jakarta melakukan pembebasan lahan bekas lokalisasi Kramat Tunggak. Penutupan ini ada pada masa Mantan Gubernur Sutiyoso. Hal ini membuat saya tertarik meneliti wilayah ini karena yang dulunya tempat prostitusi berubah menjadi tempat ibadah. Kedua, Pada tahun 1991, YKB melakukan kegiatan rintisan awal terkait HIV/AIDS dengan sasaran kelompok WPS di Kramat Tunggak. Ketiga, Penelitian tentang Kramat Tunggak memang sudah banyak, tetapi minimnya penelitian tentang Yayasan Kusuma Buana, dimana LSM tersebut berperan dalam masalah prostitusi di Kramat Tunggak. Salah satu contoh yang membahas permasalahan Kramat Tunggak yaitu Buku Perempuan-perempuan Kramat Tunggak karya Endang R Sedyaningsih-Mamahit. Buku ini ditulis berdasarkan disertasi Endang R Sedyaningsih-Mamahit dalam meraih program doktor di *Harvard School of Public Health, Boston* , Amerika Serikat. Buku ini memberi gambaran kehidupan sehari-hari wanita PSK.

Pemberdayaan program pemerintah yang bekerjasama dengan berbagai pihak khususnya organisasi sosial yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat juga digambarkan dalam buku ini. Peneliti tertarik untuk mengetahui peran dari Yayasan Kusuma Buana dalam menangani masalah yang dihadapi PSK sebagai organisasi sosial di Lokalisasi Kramat Tunggak.

A. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Dalam melakukan penelitian sejarah diperlukannya pembatasan masalah untuk mempertegas ruang lingkup dalam kajian sejarah yang menyangkut batasan tempat (*spacial*) dan batasan waktu (*temporal*). Tujuan adanya pembatasan masalah agar menghindari penyimpangan atau pelebaran masalah, sehingga penelitian lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Dari apa yang sudah peneliti paparkan dalam beberapa paragraf, maka peneliti tertarik membahas Peran Yayasan Kusuma Buana dalam pendampingan PSK di Lokalisasi Kramat Tunggak tahun 1991-1999. Pembatasan masalah pada penelitian ini dibatasi oleh aspek spasial (tempat) dan aspek temporal (waktu). Peneliti melakukan penelitian di daerah wilayah DKI Jakarta.

Sedangkan pembatasan masalah berdasarkan aspek temporal (waktu) peneliti memilih tahun 1991 sampai dengan 1999. Yayasan Kusuma Buana mulai melakukan pendampingan PSK tahun 1991 di Kramat Tunggak hingga tahun 1999 sampai akhirnya Kramat Tunggak ditutup. Pendampingan PSK meliputi pemberdayaan komunitas (*community empowerment*) dan peningkatan rasa percaya diri (*self esteem*) dengan bekerja sama oleh pemerintah.

2. Perumusan Masalah

Setelah memaparkan dasar pemikiran dan pembatasan masalah, maka peneliti mengajukan 3 pertanyaan dalam memfokuskan penelitian, yaitu :

1. Bagaimana gambaran umum mengenai Yayasan Kusuma Buana?
2. Bagaimana gambaran umum Lokalisasi Kramat Tunggak serta masalah yang dihadapi oleh PSK disana ?
3. Bagaimana peran Yayasan Kusuma Buana dalam mendampingi PSK di Lokalisasi Kramat Tunggak tahun 1991-1999?

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Menjelaskan tentang gambaran Lokalisasi Kramat Tunggak dan Yayasan Kusuma Buana serta proses pendampingan PSK oleh Yayasan Kusuma Buana terhadap 3 masalah yang dihadapi PSK yaitu masalah kekerasan, kesehatan, dan kaum psk yang dipandang negatif oleh masyarakat di lokalisasi Kramat Tunggak .

2. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya tulisan mengenai sejarah lokal khususnya di Jakarta, dan juga memperkaya khasanah bacaan mengenai sejarah dari adanya lokalisasi di Kramat Tunggak dan Lembaga Swadaya Masyarakat Yayasan Kusuma Buana yang turut andil dalam melakukan pendampingan para PSK.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pembaca mengenai situasi dan kondisi pada Lokalisasi Kramat Tunggak. Lalu dapat menjadi inspirasi terkait penanganan masalah yang diberikan oleh Yayasan Kusuma Buana dalam melakukan pendampingan PSK di Lokalisasi Kramat Tunggak.

C. Metode dan Sumber Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian sejarah, peneliti harus menuliskan hasil penelitiannya berdasarkan fakta melalui data terkait jejak-jejak kesejarahan yang ada. Sehingga, diperlukannya metode dalam melakukan penelitian sejarah. Metode yang dilakukan dalam penelitian adalah metode historis. Menurut Gilbert J Garraghan, metode penelitian sejarah adalah seperangkat aturan atau prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang efektif. (Sumargono 2021). Bisa disimpulkan, bahwa metode yang dilakukan berkaitan dengan kaidah-kaidah penelitian sejarah kritis. Kaidah-kaidah penelitian tersebut dijabarkan melalui langkah-langkah penelitian. Disini, penulis bisa klasifikan kelima instrumen penelitian sejarah

menurut Kuntowijoyo yaitu pemilihan topik, heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Kelima tahapan ini akan penulis gunakan untuk mengkaji peran lembaga swadaya masyarakat yang dilakukan oleh Yayasan Kusuma Buana dalam perannya sebagai organisasi sosial untuk permasalahan prostitusi di Jakarta.

Berikut penjelasan dari 5 tahapan tersebut :

1. Pemilihan Topik

Tahap pertama dalam metode penelitian sejarah bahwa penulis memilih topik yang akan ditulis dalam penelitiannya. Adanya unsur kedekatan emosional dalam memilih topik menunjukkan bahwa penulis harus memiliki ketertarikan secara personal terhadap topik yang dipilih. Lalu ada unsur kedekatan intelektual yang menunjukkan bahwa penulis harus menguasai konteks terhadap topik tersebut.

2. Heuristik

Heuristik berasal dari bahasa Yunani Kuno *heuriskein*, yang berarti 'mencari tahu' atau 'menemukan.' (Hertwig dan Pachur, 2015). Pengertian heuristik dalam konteks metode sejarah adalah kegiatan mencari sumber-sumber, mendapatkan data, atau materi sejarah atau evidensi sejarah (Sjamsuddin, 1996). Heuristik merupakan suatu teknik, suatu ketrampilan, dan seni dalam mencari

dan menemukan sumber.(Sayono 2021) Dalam beberapa pendapat, penulis bisa menyimpulkan bahwasanya heuristik merupakan langkah yang penting dalam melakukan penelitian sejarah dengan aktivitas mengumpulkan beberapa sumber sebanyak-banyaknya untuk dijadikan bahan oleh penulis. Hal yang diperlukan dalam heuristik adalah pemahaman tentang sumber-sumber sejarah dan teknik pengumpulannya. Menurut R. Moh. Ali dalam Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia (2005), sumber sejarah adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud, serta berguna bagi penelitian sejarah indonesia sejak zaman purba sampai sekarang. Sumber sejarah bisa berbentuk lisan, tulisan, atau audio-visual. (Ali 2005)

Untuk mendapatkan sumber-sumber sejarah, peneliti melakukan studi kepustakaan di Perpustakaan Nasional RI dan Perpustakaan Jakarta Islamic Centre Jakarta Utara , studi lapangan di Gedung Yayasan Kusuma Buana , dan juga melakukan wawancara dengan Bu Yani yaitu Direktur Sumber Daya dan Operation di Yayasan Kusuma Buana. Dalam studi kepustakaan yang dilakukan melibatkan semua jenis literatur yang akan dijadikan refrensi seperti jurnal, penelitian terdahulu seperti skripsi dan thesis, buku, media massa, dan Internet.

3. Kritik Sumber

Kritik sumber sejarah disebut proses verifikasi. Tahap kritik ini sering digunakan oleh peneliti untuk menguji keaslian suatu sumber sejarah. Menurut Sumargono dalam buku Metodologi Penelitian Sejarah (2021), kritik sumber sejarah adalah upaya mendapatkan kredibilitas sumber. Ada dua jenis kritik sejarah yaitu kritik internal dan kritik eksternal. Dikutip dari buku Pengantar Metode Penelitian (2016) oleh Maryam B. Gainau, kritik internal merupakan penilaian keakuratan pada sumber atau materi sejarah. (Gainau 2016) Kritik internal bertujuan menyelidiki isi dari dokumen bersejarah. Jadi digunakan untuk mengetahui keaslian dari aspek materi. Kritik eksternal merupakan kritik untuk menilai keaslian dari bahan yang digunakan dalam sumber sejarah. Mengujikan aspek-aspek luar dari sumber sejarah yang didalamnya mengandung aspek otentisitas yang dimiliki oleh sumber.

Kritik eksternal yang penulis lakukan yaitu pada buku Perempuan-Perempuan Kramat Tunggak. Buku ini adalah versi populer disertasi hasil riset antropologi Kesehatan di Kompleks Pelacuran Kramat Tunggak tahun 1995 oleh Endang R. Sedyaningsih-Mamahit. Dari sisi eksternal, buku ini bisa menjadi bahan untuk penulis melakukan penelitian karena sesuai dengan tema dan tahun yang penulis inginkan.

Untuk kritik internal, Endang melakukan studi awal ke Kramat Tunggak tahun 1993, lalu balik ,lagi ke tahun 1995. Di buku ini dibahas dari awal mula pembuatan Kramat Tunggak hingga ditutup dan digantikan Jakarta Islamic Centre serta beberapa tempat prostitusi yang menjadi pusat perhatian penulis di wilayah utara akibat dampak penutupan lokalisasi . Buku ini terdapat beberapa gambar yang dicantumkan dari hasil potret penulis pada masa itu. Ada beberapa wawancara dari beberapa pihak PSK. Isi buku ini juga banyak kesamaan dari sumber lain seperti buku yang ditulis Yuyu A.N Krisna berjudul Remang-Remang Jakarta yang diterbitkan tahun 1996 oleh Sinar Harapan. Ia merupakan wartawan sinar harapan pada masa itu dan melakukan penelitian di Kramat Tunggak. Kesamaan isi mulai membahas pembukaan lokalisasi hingga dampak dari adanya lokalisasi serta suasana di lokalisasi.

4. Interpretasi

Langkah yang dilakukan selanjutnya adalah interpretasi.

Interpretasi adalah proses penafsiran terhadap fakta-fakta sejarah yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber yang ditemukan serta sudah lulus dari tahap kritik. Dalam tahap interpretasi sejarah, rentan terjadinya subjektivitas. Dalam proses penafsiran terhadap fakta-fakta sejarah, penulis dituntut bersifat objektif, penulis harus bisa bersikap netral dalam meminalisir kesubjektifan. Interpretasi

dalam penulisan sejarah terbagi menjadi 2 macam yaitu interpretasi analisis (penguraian) dan sintesis (menyatukan). Sejarah sebagai peristiwa dapat diungkap kembali dengan beberapa sumber yang sudah terkumpul, sehingga proses interpretasi memang harus dilakukan secara selektif. Setiap fakta harus dipilih berdasarkan topik yang akan diteliti. Penafsiran fakta harus logis dan dapat dihubungkan satu dengan yang lain.

Salah satu fakta yang penulis uraikan adalah pembentukan lokalisasi yaitu pertama dari buku Perempuan-Perempuan Kramat Tunggak, pada tahun 1970 melalui SK Gubernur No. Ca.7/1/13/70 tanggal 27 April 1970 tentang pelaksanaan usaha lokalisasi wanita tuna susila serta pembedangan tugas dan tanggung jawab. Dengan surat gubernur No Ca.7/1/39/71 pejabat lokal mulai melokalisasi pelacuran ke Kramat Tunggak. Tanggal 28 Juli 1971 melalui SK Gubernur No, Ca.7/1/32/71 memberikan tugas dan wewenang untuk melaksanakan program resosialisasi dan rehabilitasi para pelacur dan germo oleh Panti Pendidikan Wanita Tuna Susila. Menurut fakta dari buku remang-remang Jakarta oleh Yuyu Krisna. Persiapan lokalisasi dimulai pada tahun 1969 dan baru intensif tahun 1971.(Krisna, Siregar, and Ukur 1979)

Penulis bisa menyatakan bahwa upaya sosialisasi agar mereka pindah ke lokasi yang telah disediakan oleh pemerintah telah dimulai sejak 1969. Lokasi Kramat Tunggak resmi dibuka pada 1971. Tahun 1970 para pelaku prostitusi tersebut mulai pindah ke Kramat Tunggak secara bertahap. Tahun 1971 pembangunan Kramat Tunggak lebih intensif dan kemudian diresmikan pada tahun yang sama.

5. Historiografi

Setelah tahapan sebelumnya sudah diselesaikan, maka penulis menuju tahap terakhir yaitu Historiografi. Menurut Sumargono dalam buku Metodologi Penelitian Sejarah (2021), historiografi adalah istilah untuk menyebutkan langkah terakhir dalam metode penelitian sejarah. Historiografi terbentuk dari kata Yunani, yaitu *historia* dan *grafien*. *Grafien* artinya gambaran atau tulisan, sementara *historia* berarti sejarah. Tujuan historiografi adalah untuk secara kronologis dan sistematis menulis peristiwa masa lalu. Jadi Historiografi adalah merekonstruksi dan penyusunan fakta-fakta sejarah menjadi rangkaian tulisan sejarah. Dalam menuliskan sejarah, penulis dituntut untuk memperhatikan kaidah penulisan seperti tanda baca, format penulisan, bahasa yang digunakan, penggunaan istilah serta rujukan sumber sejarahnya. Penulisan yang dilakukan menggunakan deskriptif naratif.

Penulisannya terbagi menjadi 4 bab yang terdiri dari pendahuluan, gambaran umum Yayasan Kusuma Buana, peran Yayasan Kusuma Buana dalam pendampingan PSK, dan kesimpulan. Bab pendahuluan merupakan bab awal yang terdiri 5 sub bab yakni dasar pemikiran, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode dan bahan sumber serta sistematika penulisan. Sub bab dasar pemikiran berisi mengenai latar belakang pembahasan penelitian, alasan peneliti, serta penelitian yang relevan dengan topik yang diangkat. Sub bab pembatasan dan perumusan masalah berisi mengenai batas-batas yang diangkat dalam penelitian. Sub bab metode dan bahan sumber berisi mengenai metode yang digunakan peneliti serta sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini. Sub bab terakhir berisi mengenai sistematika penulisan.

Bab kedua membahas mengenai gambaran umum Yayasan Kusuma Buana yang terdiri dari 3 sub bab. Sub bab pertama yaitu sejarah berdirinya Yayasan Kusuma Buana dengan membahas juga pendiri dari Yayasan Kusuma Buana. Sub bab kedua yaitu Visi, Misi, Nilai dari Yayasan Kusuma Buana. Sub bab ketiga yaitu membahas tentang Program Kerja Yayasan Kusuma sekitaran tahun 1991-1999 secara keseluruhan.

Bab ketiga membahas tentang Peran Yayasan Kusuma Buana dalam pendampingan PSK. Sub bab pertama yaitu

Lokalisasi Kramat Tunggak sebagai tempat pendampingan PSK oleh Yayasan Kusuma Buana, di sub bab ini penulis menjelaskan tentang sejarah berdirinya lokalisasi Kramat Tunggak serta memasukkan sub-sub bab yaitu masalah yang dihadapi PSK di lokalisasi Kramat Tunggak. Sub bab kedua yaitu membahas mengenai Peran YKB dalam Pemberdayaan Komunitas (*Community Empowerment*) dan Peningkatan Rasa Percaya Diri (*Self Esteem*) dalam melakukan pendampingan PSK disana. Sub bab ketiga yaitu membahas hambatan yang didapat dari proses pendampingan PSK oleh Yayasan Kusuma Buana. Sub bab keempat membahas mengenai hasil daripada pendampingan PSK yang menghasilkan Yayasan BandungWangi.

Bab terakhir yakni kesimpulan. Bab ini berisi rangkuman atau hasil akhir dari rangkaian penelitian mengenai Peran Yayasan Kusuma Buana dalam pendampingan PSK di Lokalisasi Kramat Tunggak tahun 1991-1999. Bab ini juga menjabarkan hasil dari pertanyaan yang dituliskan dalam rumusan masalah sehingga tercipta benang merah dalam penelitiannya.

2. Bahan Sumber

Sumber-sumber yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah berbagai jenis sumber mulai dari buku, tesis, arsip, artikel jurnal, skripsi dan wawancara (sumber lisan). Sumber primer yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang sudah penulis dapatkan satu narasumber yaitu Ibu Yani yaitu Direktur Sumber Daya dan Operation dari Yayasan Kusuma Buana. Penulis akan mengusahakan untuk memperoleh dokumen atau arsip dari Yayasan Kusuma Buana, juga beberapa dokumen atau arsip dari Perpustakaan Nasional Indonesia dan Perpustakaan JIC selaku bekas tempat lokalisasi.

Penulis sudah menjajaki beberapa perpustakaan dan mencari beberapa sumber dari internet dengan tujuan memperoleh sumber sekunder. Sejauh ini peneliti sudah mengunjungi beberapa perpustakaan. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di Jl. Medan Merdeka Selatan Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat. Perpustakaan Jakarta Islamic Centre di Jalan Kramat Jaya Kel. Tugu Utara, Kec. Koja Jakarta Utara. Dari beberapa perpustakaan, penulis menghimpun beberapa buku, yaitu *buku Perempuan-Perempuan Kramat Tunggak karya Endang R Sedyaningsih dan Mamahit. Buku Ali Sadikin Membenahi Jakarta Menjadi Kota Yang Manusiawi karya Ramadhan*

K.H. Buku Bang Ali Demi Jakarta 1966-1977 karya Ramadhan K.H. Dokumen Masalah Pelacuran Dalam Hubungannya Dengan Rehabilitasi Di Daerah Kramat Tunggak Tanjung Priuk Jakarta Utara oleh Markas Besar Kepolisian RI Lembaga Kriminologi, dan juga Buku Pengantar Ilmu Sejarah karya Kuntowijoyo.

Penulis juga memperoleh bahan sumber dari hasil pencarian di Internet berupa skripsi, tesis, dan artikel jurnal ilmiah. *Pertama adalah sebuah tesis karya Sutrisno 'Dampak Penutupan Lokalisasi/Resosialisasi WTS Kramat Tunggak Terhadap Masyarakat Kelurahan Tugu Utara'. Kedua adalah sebuah skripsi karya Fikri 'Lokalisasi Kramat Tunggak Pada Masa Gubernur Ali Sadikin : 1971-1977'. Ketiga adalah sebuah jurnal karya Paramita Widyaningrum, Tri Yuniarto, dan Djono yaitu 'Peran Ali Sadikin Dalam Pembangunan Kota Jakarta Tahun 1966-1977'. Keempat adalah sebuah jurnal karya Erlllyn Nurdiansyah Peran LSM Kusuma Buana Dalam 'Pendampingan PSK Di Desa Bongas, Indramayu, Jawa Barat'. Yang terakhir adalah sebuah jurnal karya Lamijo 'Prostitusi Di Jakarta Dalam Tiga Kekuasaan 1930-1959 Sejarah Dan Perkembangannya'.*